



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA BUKITTINGGI DALAM PENERBITAN KARTU  
IDENTITAS ANAK BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana Hukum (SH)*



**Oleh:**

**RINALDO OKTAVIANO**  
**NIM : 11527103142**

**PROGRAM S1  
JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1440 H/2019 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **“Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak”**, yang ditulis oleh :

Nama : RINALDO OKTAVIANO

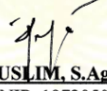
NIM : 11527103142

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Agustus 2019

Pembimbing

  
**MUSLIM, S.Ag., S.H., M.Hum**  
 NIP. 19720505 201411 1 002

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PERANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BUKITTINGGI DALAM PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK", yang ditulis oleh :

Nama : **RINALDO OKTAVIANO**  
 NIM : 11527103142  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 12 September 2019  
 Waktu : 13.30 Wib  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Oktober 2019 M

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Drs. H. Heri Sunandar, M.CI**

Sekretaris  
**Roni Kurniawan, SH., MH**

Penguji I  
**Lovelly Dwina Dahan, SH., MH**

Penguji II  
**Hj. Nuraini Sahu, SH., MH**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
**NIP. 19580712 198603 1 005**

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RINALDO OKTAVIANO  
 NIM : 11527103142  
 Tempat / Tanggal Lahir : Bukittinggi, 01 Oktober 1996  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak”**, adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat dari hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 7 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan

**RINALDO OKTAVIANO**  
 NIM: 11527103142

UIN SUSKA RIAU





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN PEMBIMBING

**MUSLIM, S.Ag., S.H., M.Hum**  
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

No : Nota Dinas  
Lamp : -  
Hal : Pengajuan Skripsi  
Sdr. RINALDO OKTAVIANO

*Assalamu 'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara RINALDO OKTAVIANO, yang berjudul **“Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak”** dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Pekanbaru, 22 Agustus 2019

Pembimbing

**MUSLIM, S.Ag., S.H., M.Hum**  
NIP. 19720505 201411 1 002

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

***Rinaldo Oktaviano (2019) : Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.***

Dalam rangka memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik dan untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak. Dan mengingat bahwa pada saat ini anak yang berusia dibawah 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAD). Oleh karena itu Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang dimana mengharuskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi dan jemput bola ke lapangan agar program ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam kenyataannya dilapangan sebagian besar anak-anak usia dibawah 17 tahun yang masih belum memiliki Kartu Identitas Anak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Disdukcapil Kota Bukittinggi dalam melaksanakan program KIA ini dan kendala yang dihadapi oleh Disdukcapil Kota Bukittinggi dalam melaksanakan program KIA ini.

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (Yuridis Sosiologis) yang terkait dengan pengaruh berlakunya hukum positif sehingga dalam memperoleh data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Analisa data yang digunakan ialah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan peranan Disdukcapil Kota Bukittinggi masih belum maksimal diakarenakan beberapa faktor yaitu anggaran dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan faktor dari masyarakat itu sendiri.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.*

Alhamdulillah, setinggi puja sedalam syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tidak terhingga kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak***". Shalawat beserta salam untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga di akhirat kelak kita mendapat syafa'at atau pertolongan dari Beliau.

Merupakan sebuah kebahagiaan telah menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang diinginkan, dengan selesainya sebuah kado kecil untuk mendapatkan predikat sarjana ini tidak lepas dari dukungan orang-orang yang telah banyak memberikan bantuan kepada Penulis oleh karenanya Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

Kedua orang tua Penulis, Ibunda Irmailis dan Ayahanda Yusrizal beserta keluarga tercinta yaitu Annisa Dewi Aprina, S.E dan Fino Rimoza yang selalu memberikan yang terbaik kepada Penulis meski dalam keadaan sulit. Semua berkat do'a dan nasehat yang selama ini diberikan.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan penulis kesempatan menuntut ilmu pengetahuan di kampus ini.

Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCI selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II. Dan Bapak Dr. H. Maghfirah, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

4. Bapak Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengarahannya kepada penulis.

5. Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum serta sekaligus pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatiannya, serta memberikan bimbingan yang terbaik kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Penasehat Akademis Penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Seluruh Dosen pengajar serta pegawai di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Ridwan Efendi, S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi beserta seluruh jajarannya yang telah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengizinkan penulis melakukan riset dan memperoleh informasi terkait penulisan skripsi ini.

Untuk sahabat serta teman-teman Ilmu Hukum E dan konsentrasi Hukum Tata Negara C, serta teman-teman penulis lainnya yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga persahabatan kita terjalin dan sama-sama mencapai kesuksesan. Aamiinn.

Tidak ada gading yang tidak retak, manusia adalah tempatnya khilaf dan salah. Oleh karena itu penulis menyadari bahwa sangat banyak kekurangan di dalam tulisan ini. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan tulisan ini.

Akhirnya Penulis hanya dapat berharap semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi Penulis khususnya dan para pembaca umumnya serta bermanfaat untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan. Aamiin ya rabbal 'alamin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Pekanbaru, Agustus 2019**

**Penulis**

**RINALDO OKTAVIANO**  
**NIM. 11527103142**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Kondisi Geografis Kota Bukittinggi .....	17
B. Kondisi Demografis Kota Bukittinggi .....	20
C. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi ....	21
D. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.....	22
E. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi .....	28
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Teori Peranan .....	30
B. Teori Kebijakan Publik .....	34
C. Teori Pelayanan Publik .....	39
D. Teori Administrasi Kependudukan .....	48
E. Kartu Identitas Anak .....	51



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Dalam Menerbitkan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak ..... 54
- B. Faktor yang Menjadi Kendala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dalam Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak ..... 66

## BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan ..... 69
- B. Saran..... 70

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi dan Sampel .....	12
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi .....	21
Tabel 3.1 Persyaratan Penerbitan Kartu Identitas Anak .....	52



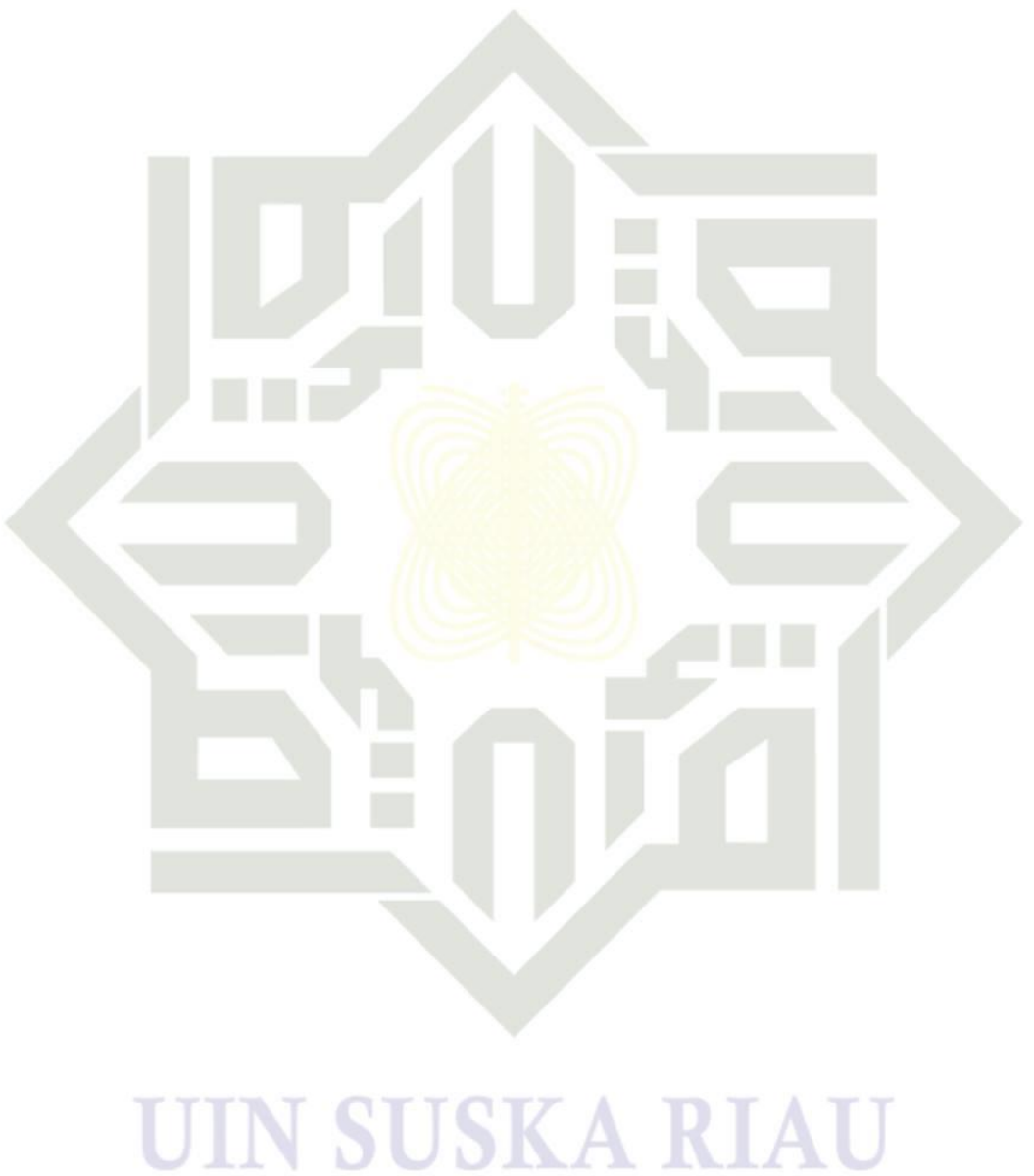
UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Bukittinggi .....	18
---	----



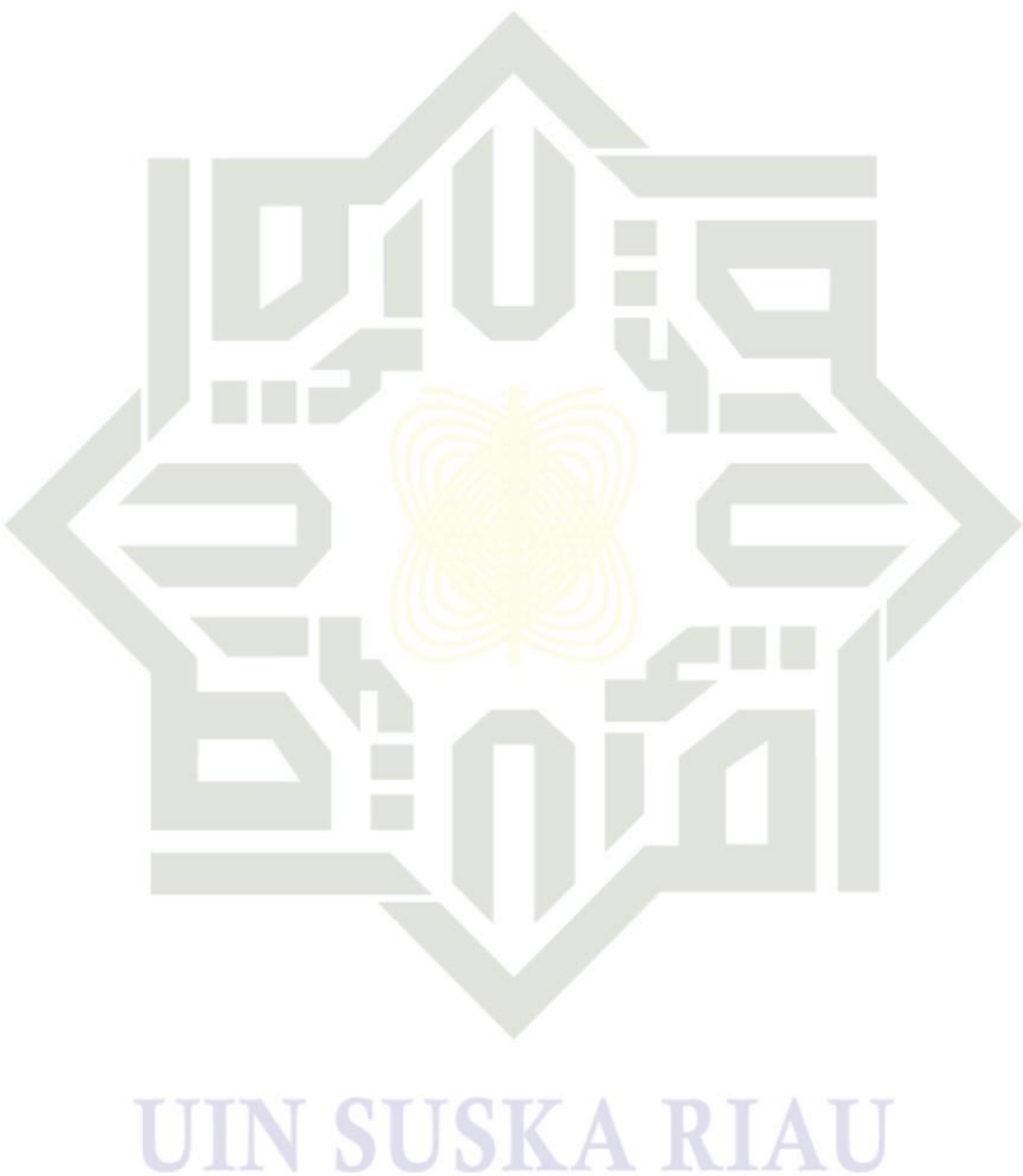
### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi .....	23
-------------------------------------	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang Masalah

Hukum ditempatkan sebagai aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sesuai dengan landasan konstitusional Indonesia yaitu merupakan negara hukum, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>1</sup> Jadi setiap hal yang berkenaan dengan negara dalam hal ini pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, maka dari itu, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang bertindak apalagi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan masyarakat juga harus setia dan taat mematuhi hukum atau aturan yang berlaku di negara Indonesia.

Hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara (pemerintahan) diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat.

Negara adalah organisasi atau kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhak menentukan tujuan nasionalnya.<sup>2</sup> Pada konteks negara Indonesia tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yang mengidentifikasikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsep *welfare state*. Sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, setiap kegiatan disamping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai juga harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sebagai aturan kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.<sup>3</sup>

Pertumbuhan penduduk dalam suatu negara menuntut pemerintahnya untuk mampu menyediakan berbagai sarana dan pemenuhan hajat hidup bagi rakyatnya. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia dengan jumlah penduduk mencapai 265.015.300 jiwa.<sup>4</sup> Tentu saja masalah kependudukan menjadi masalah yang besar bagi bangsa Indonesia.

Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk yang berada di dalam atau di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Adapun penduduk Indonesia adalah keseluruhan penghuni negara kesatuan Republik Indonesia, baik yang warga negara Indonesia maupun yang

<sup>2</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/negara>, diakses tanggal 14 Januari 2019 Pukul 21.13 WIB.

<sup>3</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuasa, 2009), h. 11.

<sup>4</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_negara\\_menurut\\_jumlah\\_penduduk](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk), diakses tanggal 14 Januari 2019 Pukul 21.56 WIB.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warga negara asing yang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan warga negara Indonesia, maka perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan beberapa pasal mengalami perubahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.<sup>6</sup> Administrasi kependudukan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan identitas kependudukan kepada setiap warga negara. Bentuk identitas yang diberikan kepada warga negara tercantum dalam Pasal 2 huruf a Undang-

<sup>5</sup> Aulia Aziza, dkk, 2017, *Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di kota Semarang*, Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: vol. 6, No. 2, Semarang, h. 2.

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah dokumen kependudukan.

Dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

KTP-el sebagai salah satu identitas yang diperuntukkan bagi penduduk yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas, hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan terhadap identitas anak yang masih dibawah 17 tahun. Akta kelahiran yang dimiliki oleh seorang anak tidaklah cukup, karena pada dasarnya akta kelahiran yang diberikan hanya dapat memberikan status kepada anak. Akta kelahiran menunjukkan keabsahan legalitas seseorang dan menunjukkan kewarganegaraan seseorang. Identitas seseorang dapat dibuktikan salah satunya dengan kartu identitas, tetapi pada saat ini nyatanya anak-anak usia dibawah 17 tahun belum memiliki kartu identitas yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan.<sup>7</sup>

Jadi menurut penjelasan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang wajib memiliki dokumen kependudukan seperti KTP-el hanyalah warga negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas. Sedangkan untuk anak-anak yang berusia dibawah 17 tahun tidak memiliki dokumen

<sup>7</sup> Aulia Aziza, dkk, *Op. Cit.*, h. 3.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kependudukan selain dari akta kelahiran. Maka hal tersebut menimbulkan asumsi bahwasanya telah terjadi diskriminasi terhadap anak-anak yang berusia dibawah 17 tahun.

Dalam membuat sebuah peraturan haruslah didasarkan pada beberapa hal yang dituangkan dalam bentuk “menimbang” atau “mengingat” dalam peraturan tersebut. Maria Farida mengatakan menimbang atau konsideran dalam suatu peraturan perundang-undangan memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bagian mengingat dikenal sebagai dasar hukum merupakan suatu landasan yang bersifat yuridis bagi pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Alasan atau latar belakang pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak adalah :

1. Pemerintah melihat saat ini anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah belum memiliki identitas kependudukan yang berlaku secara nasional dan belum terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;
2. Bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang

<sup>8</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan : Proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 108.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konsitusional warga negara; dan

3. Bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.<sup>9</sup>

Akhirnya berdasarkan alasan tersebut diatas pemerintah melalui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diharapkan menjadi kartu identitas bagi anak. KIA ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, dalam Permendagri ini mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan KIA seperti syarat-syarat untuk mendapatkan KIA, prosedur untuk mendapatkan KIA, elemen yang tercantum dalam KIA, serta peranan yang harus dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan lain sebagainya.

Namun hal ini menimbulkan banyak polemik, ada yang pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini sosialisasi akan program KIA ini juga sangat minim dan bahkan hampir tidak memiliki gema ditengah-tengah masyarakat.

Dalam berbagai penjelasan yang dikemukakan pemerintah, bahwa kartu yang berfungsi layaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi anak di bawah usia 17 tahun ini bisa digunakan untuk berbagai hal, seperti membuka tabungan di

<sup>9</sup> Lihat bagian Menimbang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bank, passport, kartu sehat, kartu pintar, dan lainnya atas nama sendiri.<sup>10</sup> Melalui KIA pemerintah berharap adanya peningkatan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak. Bukan hanya itu, KIA bersama dengan akta kelahiran diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan atas pengakuan hak anak berikut dengan perlindungannya.

KIA ternyata wajib dimiliki anak. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Namun, kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) yang menyatakan bahwa Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. KIA ini juga memiliki tujuan dengan dicantumkan dalam Pasal 2 yang berbunyi pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya bagi anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK).

Menurut Sekretaris Disdukcapil Kota Bukittinggi Masriwal, Kamis (30/3/2017) yang dikutip dari media online rri.co.id, menjelaskan disamping

<sup>10</sup> Chandy Afrizal, dkk, 2017, *Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak Di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, h. 1

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana APBD, untuk menerbitkan KIA disertai blanko juga dibantu dana dari APBD Provinsi Sumatera Barat, yang hingga kini belum cair, namun secara prinsip penerbitannya tinggal menunggu waktu.<sup>11</sup> Namun hingga kini, setelah kurang lebih tiga tahun diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, masih banyak anak-anak yang berusia dibawah 17 tahun di Kota Bukittinggi yang masih belum memiliki KIA.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut penulis menjadi tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu maka penulis memilih judul : **“Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak”**.

### B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan dalam penelitian ini yaitu khusus membahas peranan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan diangkat dalam penulisan ini adalah :

<sup>11</sup> <http://rri.co.id/post/berita/377480/> daerah penerbitan kartu identitas anak di Bukittinggi tunggu pencairan dana APBD, diakses tanggal 16 Januari 2018, Pukul 09.20 WIB.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak ?  
 Apa faktor yang menjadi kendala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak ?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah yang terdapat pada suatu penelitian<sup>12</sup>. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak; dan
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

<sup>12</sup> Indra, dkk, *Panduan Penyusunan Skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA, 2014), h. 17.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Manfaat Penelitian

Penulis juga ingin mencapai manfaat baik bagi penulis maupun bagi orang lain yaitu :

- a. Menambah wawasan dan cakrawala bagi penulis.
- b. Memberikan masukan dan informasi ilmu pengetahuan bagi pihak lain serta sebagai bahan perbandingan bagi penulis atau peneliti lain dalam melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam bentuk karya ilmiah dalam lingkup Hukum Tata Negara kepada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum khususnya kepada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

### E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>13</sup> Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dan jalan mempelajari, menganalisa, dan memenuhi keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian.

#### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian ini yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikaitkan dengan studi kepustakaan. Pada penelitian hukum sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.<sup>14</sup> Penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.<sup>15</sup> Pada umumnya pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan, observasi (pengamatan) dan wawancara (*interview*).

Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>16</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi yang beralamat di Jl. H. Miskin No. 91-95, Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian, selain itu penulis menemukan kesenjangan antara peraturan dan penegakannya di lapangan.

### Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati),

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 133.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1982), h. 51.

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, h. 25.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>17</sup> Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>18</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait langsung dengan judul penelitian yaitu Pimpinan dan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.

Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>19</sup>

Jumlah populasi dan sampel yang akan penulis teliti dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Populasi Dan Sampel**

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi	1	1	100 %
2.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	1	100 %
3.	Petugas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi	5	1	20 %
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>3</b>	<b>42.85 %</b>

Sumber: Data Lapangan 2019

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 118.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 119.

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, h. 106.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

##### a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>20</sup>

##### b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

##### c. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, jurnal, makalah, dan internet.

#### Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 106.

<sup>21</sup> *Ibid.*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengamatan (*Observation*) yaitu kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.<sup>22</sup>
- b. Wawancara (*Interview*) yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>23</sup> Teknik pengumpulan data ini yaitu *interviewer* dapat bertanya langsung kepada responden.
- c. Studi Pustaka yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>24</sup>

### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian sehingga akan mendapatkan hasil yang akan mendekati kebenaran yang ada. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 114.

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, h. 82.

<sup>24</sup> Syamsudin, *Op. Cit.*, h. 101.

<sup>25</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2011), h. 5.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.<sup>26</sup>

Untuk itu di dalam penelitian ini digunakan deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul yang berbentuk naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan-permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dalam permasalahan tersebut. Dan penarikan kesimpulan digunakan metode deduktif yang mana cara penarikan kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang dibagi dalam sub-sub bagian sebagai berikut :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 7.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Berisikan tentang gambaran umum yang berisikan pemaparan tentang lokasi penelitian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dan Kelurahan Campago Ipuh Kota Bukittinggi.

## **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis.

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dalam penerbitan Kartu Identitas Anak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dan mengenai faktor penghambat dalam melaksanakan peraturan tersebut.

## **BAB V : PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Kondisi Geografis Kota Bukittinggi

Secara geografis Kota Bukittinggi membentang antara  $100^{\circ}20'$  -  $100^{\circ}25'$  Bujur Timur dan antara  $00^{\circ}16'$  -  $00^{\circ}20'$  Lintang Selatan. Posisi ini menjadikan iklim di Bukittinggi masuk kedalam iklim tropis. Letak Bukittinggi pada ketinggian antara 780 - 950 meter di atas permukaan laut, menyebabkan udara di Bukittinggi relatif sejuk dan cocok untuk tempat peristirahatan dan tujuan wisata. Letak geografis ini cukup strategis, terutama bila dikaitkan dengan posisi sentral Bukittinggi terhadap lintasan regional antar ibu kota provinsi, seperti lintasan dari Padang ke Medan, dan lintasan dari Padang ke Pekanbaru.

Kota Bukittinggi terletak pada ketinggian antara 780 - 950 meter di atas permukaan laut, yang memiliki kondisi topografi yang beragam yaitu relatif datar, berbukit-bukit dan di beberapa kawasan memiliki keterjalan hampir vertikal seperti di kawasan sepanjang Ngarai Sianok. Beberapa wilayah yang relatif berbukit terletak sekitar Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kelurahan Campago Ipuh, Kelurahan Kubu Gulai Bancah dan Kelurahan Pulau Anak Air. Wilayah yang relatif curam terdapat di sepanjang Ngarai Sianok yang membentang dari Utara sampai bagian Selatan di sebelah Barat Kota Bukittinggi. Daya dukung tanah di wilayah berbukit dan curam di sekitar Ngarai ini relatif kurang stabil dan dapat menimbulkan longsor.

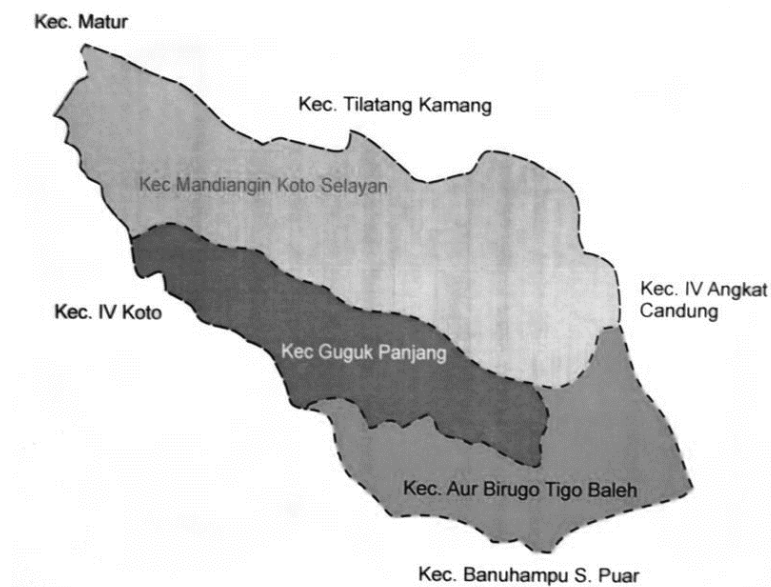
Tipologi hidrologi wilayah Bukittinggi merupakan tipologi wilayah aliran pada dataran tinggi. Mayoritas merupakan daerah hulu sungai (*up stream*)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan pola dendritik, aliran air yang relatif deras. Selain itu kondisi kelerengannya Kota Bukittinggi yang banyak membentuk aliran-aliran air (*raven*) menyebabkan banyak terjadi penyusupan air melalui aliran bawah tanah.

**Gambar 2.1**



### **Peta Administrasi Kota Bukittinggi**

Luas Kota Bukittinggi  $\pm 25,239 \text{ Km}^2$  (2.523,90 ha) atau sekitar 0,06% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Pada saat ini luas kota tersebut menampung seluruh kegiatan yang berlangsung di Kota Bukittinggi, selaras dengan fungsi Kota Bukittinggi sebagai kota perdagangan, jasa, dan pariwisata yang melayani tidak hanya terbatas pada pelayanan tingkat Kota Bukittinggi, tetapi juga sampai lingkup yang lebih luas, maka kegiatan pada siang hari menjadi jauh lebih besar daripada malam hari.

Secara administrasi Kota Bukittinggi berbatasan dengan beberapa wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Agam, yaitu :

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Gadut dan Kapau; Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Banuhampu; Kecamatan Banuhampu Sungai Puar Kabupaten Agam.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Sianok, Guguk, dan Koto V Gadang; Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang; Kecamatan IV Angkat Candung Kabupaten Agam.

Kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi adalah:

1. Kecamatan Guguk Panjang dengan luas areal 6,831 km<sup>2</sup> (683,10 ha) atau 27,06% dari total luas Kota Bukittinggi dan mempunyai penduduk sebanyak 43.331 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 6.348 jiwa/km<sup>2</sup> yang meliputi 7 kelurahan yaitu: Kelurahan Tarok Dipo, Bukit Cangang Kayu Ramang, Pakan Kurai, Aua Tajungkang Tengah Sawah, Benteng Pasar Atas, Kayu Kubu, Bukit Apit Puhun.
2. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas areal 12,156 km<sup>2</sup> (1.215,60 ha) atau 48 % dari total luas Kota Bukittinggi dan mempunyai penduduk sebanyak 50.193 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 4.129 jiwa/km<sup>2</sup> yang meliputi 9 kelurahan yaitu: Kelurahan Campago Guguk Bulek, Campago Ipuh, Puhun Tembok, Kubu Gulai Bancah, Puhun Pintu Kabun, Pulai Anak Air, Koto Selayan, Garegeh, Manggis Gantiang.

3. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas areal 6,252 km<sup>2</sup> (625,20 ha) atau 24,77% dari total luas Kota Bukittinggi dan mempunyai penduduk sebanyak 25.659 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 4.104 jiwa/km<sup>2</sup> yang meliputi 8 kelurahan yaitu: Kelurahan Aur Kuning, Birugo, Belakang Balok, Sapiran, Kubu Tanjung, Pakan Labuh, Parit Antang, Ladang Cakiah.

## B. Kondisi Demografis Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian dari bekas Kerajaan Minangkabau yang terkenal dengan sebutan Ranah Minang. Masyarakatnya terkenal dengan kehidupan yang menggunakan sistem Matrilineal dengan adatnya yang unik. Dalam sistem ini harta pusaka, gelar dan nama suku, diturunkan menurut silsilah garis keturunan ibu.

Mayoritas penduduk Kota Bukittinggi adalah pemeluk agama Islam yang taat dan pemegang adat yang kuat. Karakter masyarakatnya yang mandiri, dinamis, kritis dan unggul dalam mengembangkan kewirausahaan. Kaidah-kaidah agama dan adat terpadu secara serasi di dalam tata kehidupan.

Walaupun saat ini Bukittinggi telah menjadi kawasan urban namun secara budaya, masyarakat Bukittinggi masih memegang teguh adat-istiadat yang dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari dimana prinsip utama masyarakat Minangkabau “*Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” sangat menonjol. Kaitan budaya dan agama dapat juga dilihat dari ungkapan “*Syarak Mangato Adaik Mamakai*”.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penduduk Kota Bukittinggi cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan penduduk ini tidak terlepas dari keberadaan peran kota ini sesuai dengan potensi dibidang pendidikan, kesehatan, pariwisata, serta perdagangan yang mengakibatkan meningkatnya arus urbanisasi di Kota Bukittinggi.

Tahun 2019, jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebanyak 120.634 jiwa.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi**

Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Gugak Panjang	21.811	21.641	43.452
Mandiingin Koto Selayan	25.656	25.388	51.044
Aur Birugo Tigo Baleh	13.095	13.043	26.138
<b>Jumlah</b>	<b>60.562</b>	<b>60.072</b>	<b>120.634</b>

Sumber: Data Disdukcapil 2019

### C. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sedangkan tugas dan fungsinya diuraikan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi

mempunyai tugas pokok : *“Membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah”*.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### **D. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi**

Untuk menunjang pelaksanaan urusan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU

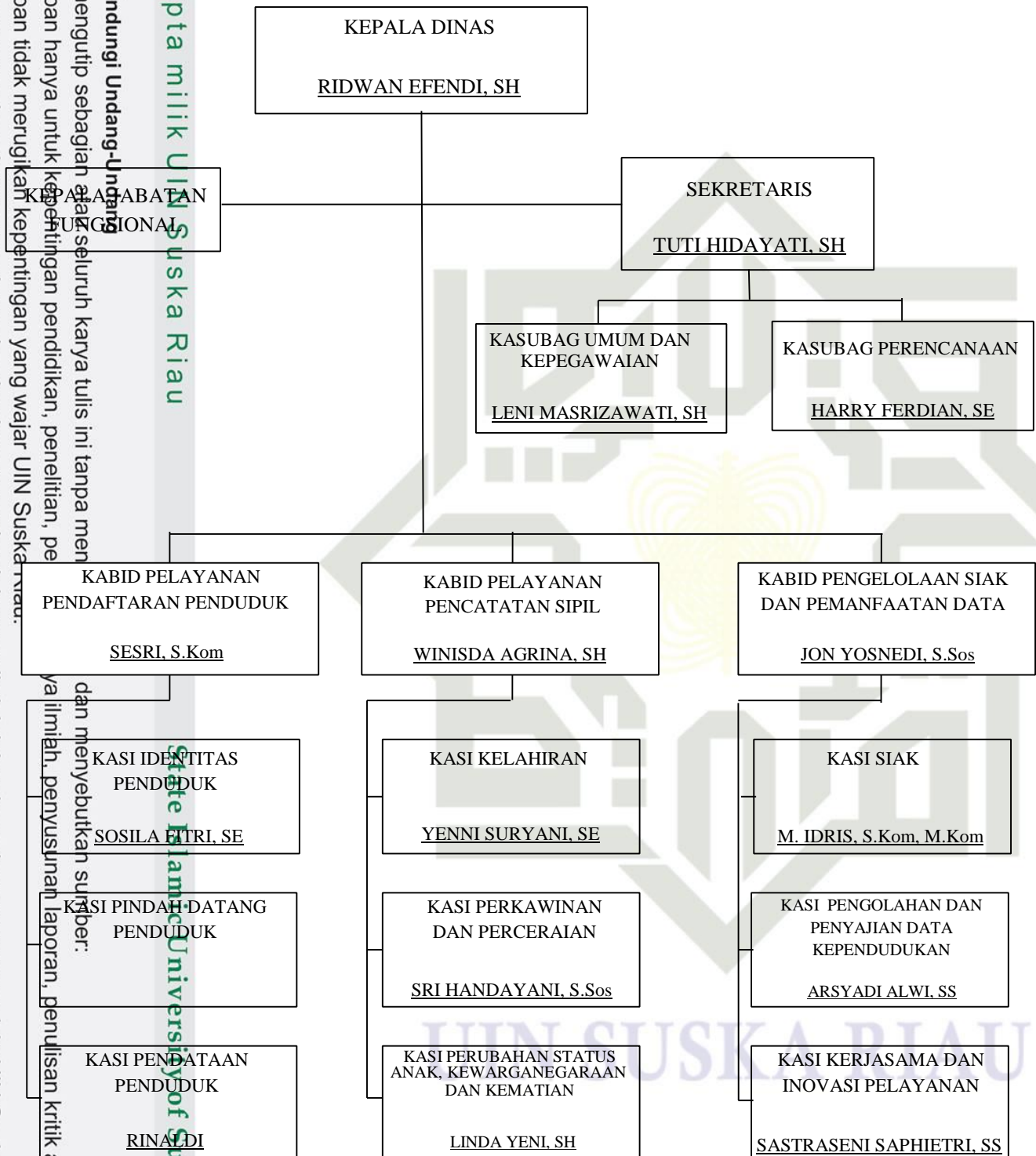
#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Bagan 2.1**  
**Susunan Organisasi**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa men-
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pe-
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Adapun rincian tugas dan fungsi sekretariat dan bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, adalah sebagai berikut:

#### a. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan asset;
2. Pengkoordinasian perencanaan, serta pelaporan program dan kegiatan dinas;
3. Perumusan rencana kerja sesuai dengan Renstra Dinas;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran dinas;
5. Pengelolaan anggaran dan keuangan dinas;
6. Penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah dilingkup Dinas; dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas, sekretaris membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan pendaftaran penduduk. Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugasnya, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan pelayanan dan perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk;
2. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
3. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
4. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
5. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
6. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk; dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahi :

1. Seksi Identitas Penduduk.
2. Seksi Pindah Datang Penduduk.
3. Seksi Pendataan Penduduk.

#### Tugas dan Fungsi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencatatan sipil. Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugasnya, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja bidang pelayanan pencatatan sipil mengacu pada rencana strategis dinas;
2. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
6. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
7. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencatatan sipil; dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala bidang Pencatatan Sipil membawahi :

1. Seksi Kelahiran.
2. Seksi Perkawinan dan Perceraian.
3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan, dan Kematian.

4. Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan SIAK dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan





administrasi kependudukan. Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugasnya, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, mempunyai fungsi :

1. Penyusunan perencanaan pengelolaan Informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan Informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan Informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
4. Pelaksanaan pengelolaan Informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data membawahi :

1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
2. Seksi pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
3. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

#### E. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi

##### 1) Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Setiap lembaga memiliki visi guna mengetahui gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Untuk menjawab segala tantangan dan peluang dalam perubahan serta paradigma perencanaan pembangunan kedepan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi memiliki Visi : “Terwujudnya Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang Berbasis Pelayanan Prima”.

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut bermakna bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi sebagai unsur utama yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kependudukan dan catatan sipil berperan dalam mewujudkan pelayanan yang ramah, cepat dan tanggap atas permasalahan yang dikemukakan oleh masyarakat, mempunyai inisiatif untuk membantu, memberikan penjelasan yang mudah dimengerti oleh masyarakat dan menyediakan layanan lanjutan apabila diperlukan, memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pelayanan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas data dan dokumen kependudukan,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya/perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberdayakan masyarakat di bidang administrasi kependudukan.

#### 2) Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan misi merupakan pernyataan apa yang harus dicapai dan kegiatan-kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan. Untuk maksud tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi menetapkan misinya sebagai berikut :

1. Penataan pelayanan kependudukan secara tertib dan akurat;
2. Menerapkan dan mengembangkan sistem data dan informasi yang akurat berbasis teknologi informasi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Peranan

##### a. Pengertian Peranan

Teori peranan (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi.<sup>27</sup> Peran terdiri atas harapan yang melekat pada ciri-ciri perilaku tertentu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki posisi atau status sosial tertentu dalam masyarakat.

Setiap peran memiliki tugas tertentu yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran. Dalam pendapat lain peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.<sup>28</sup>

Dalam setiap masyarakat dikenal adanya status atau kedudukan dan peranan (*role*). Suatu status atau kedudukan merupakan suatu posisi dalam sistem sosial, dengan demikian peranan adalah pola perilaku yang dikaitkan dengan status atau kedudukan. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat

<sup>27</sup> Gartiria Hutami dan Anis Chariri, *Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)*, Jurnal Universitas Diponegoro.

<sup>28</sup> Muthiawanthi, 2017, *Tantangan "Role"/Peran yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EA Setelah Kembali ke Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora: Vol. 4, No. 2, Jakarta, h. 107.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan dan tak ada pula kedudukan tanpa peranan, dan peranan juga dikatakan konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi dan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>29</sup> Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain (dalam film, sandiwara, dsb), tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa, orang yang bertugas dan berkewajiban menjadi dan menampilkan seorang tokoh dalam sebuah cerita dramatik<sup>30</sup>, atau peranan dapat dikatakan juga seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Sukanto menjelaskan bahwa peranan dianggap penting karena ia mengatur perilaku seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan orang lain serta mengatakan bahwa peranan mencakup pada tiga hal yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dibutuhkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 54.

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peranan>, diakses pada tanggal 8 Juli 2019, Pukul 19.43 WIB.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangkaian perbuatan yang membimbing dalam kehidupan kemasyarakatan;

2. Peranan adalah suatu konsep apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; dan
3. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting struktur sosial masyarakat.<sup>31</sup>

Menurut Komaruddin dalam buku “Ensiklopedia Manajemen”

mengungkapkan konsep tentang peranan (*role*) adalah sebagai berikut :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam manajemen;
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status;
3. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya; dan
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan-hubungan sebab akibat.<sup>32</sup>

Ada tiga peranan yang dilakukan pemimpin dalam organisasi, yaitu :

1. Peranan Antar Pribadi (*Interpersonal Role*), dalam peranan antar pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin, dan sebagai penghubung antar organisasi yang dikelolanya berjalan dengan lancar.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 243.

<sup>32</sup> Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 768.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (*Informational Role*), peranan interpersonal diatas meletakkan atasan pada posisi yang unik dalam hal mendapatkan informasi.
3. Peranan Pengambil Keputusan (*Decisional Role*), dalam peranan ini atasan harus terlibat dalam suatu proses pembuatan strategi di dalam organisasi yang dipimpinnya.<sup>33</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua variabel yang merupakan hubungan sebab akibat.

Sedangkan unsur-unsur pokok dari suatu peranan adalah :

1. Peranan yang diharapkan dari masyarakat.
2. Peranan sebagaimana dianggap oleh masing-masing individu.
3. Peranan yang dijalankan oleh kenyataan.

Adapun maksud dari definisi yang telah dikemukakan di atas, menyatakan bahwa kepala dinas memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan mengantisipasi permasalahan sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, maka Dinas

<sup>33</sup> Miftah Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 12.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran yang sangat besar dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak.

### B. Teori Kebijakan Publik

#### a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, dan merupakan suatu analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Kebijakan adalah sebuah keputusan politis yang diambil oleh pemerintah dan sebagai bagian dari sikap pemerintah untuk memecahkan sebuah persoalan publik.<sup>34</sup>

Chandler dan Plano mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.

William N. Dunn mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesehatan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Thomas R. Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya

<sup>34</sup> Dian Fitriani Afifah dan Neneng Yani Yuningsih, 2016, *Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak Di Kabupaten Cianjur*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran: Vol. 2, No. 2, Bandung, h. 335

(objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Chaizi Nasucha mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam prangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.<sup>35</sup>

Defenisi kebijakan publik di atas dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan publik. Jadi idealnya suatu kebijakan publik itu dibuat untuk dilaksanakan dalam bentuk riil bukan sekedar dinyatakan.

Kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut dengan konvensi-konvensi. Contoh dari kebijakan publik ini yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Gubernur dan Peraturan/Keputusan Walikota/Bupati.

Dalam peraturan tertulis, tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu antara lain:

<sup>35</sup> Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 38.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kebijakan publik tertinggi adalah kebijakan publik yang mendasari dan menjadi falsafah dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan produk pendiri bangsa Indonesia, yang dapat di revisi hanya oleh MPR, sebagai perwujudan dari seluruh rakyat Indonesia.
2. Kebijakan publik yang kedua adalah yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Model ini bukan menyiratkan ketidakmampuan legislatif, namun menyiratkan tingkat kompleksitas permasalahan yang tidak memungkinkan legislatif bekerja sendiri. Contoh kebijakan publik yang dibuat bersama antara eksekutif dan legislatif ini adalah Undang-undang dan Peraturan Daerah.
3. Kebijakan publik yang ketiga adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja. Dalam perkembangannya, peran eksekutif tidak cukup melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif, karena produk dari legislatif berisikan peraturan yang sangat luas, sehingga dibutuhkan peraturan pelaksana yang dibuat sebagai turunan dari produk peraturan legislatif.<sup>36</sup>

Selain rumusan diatas, dapat pula disimpulkan bahwa kajian kebijakan

publik merupakan studi yang kompleks, karena pelaksanaan suatu kebijakan

publik harus melalui sejumlah tahapan, yaitu :

1. Pengidentifikasian dan merumuskan masalah publik;

<sup>36</sup> Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 37.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perumusan dan pengagendaaan suatu kebijakan;
3. Penganalisaan suatu kebijakan;
4. Pembuatan keputusan terhadap suatu kebijakan;
5. Pengimplementasian dan pemantauan suatu kebijakan;
6. Pengevaluasian suatu kebijakan, apakah telah mencapai hasil sebagai mana disainya; dan
7. Pengkajian dampak dan efektifitas pelaksanaan suatu kebijakan.<sup>37</sup>

### Bentuk-Bentuk Kebijakan Publik

Pada umumnya kebijakan publik dapat dibedakan atas beberapa bentuk,

yaitu :

1. *Regulatory*, yaitu mengatur perilaku orang;
2. *Redistributive*, yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya dan memberikannya kepada yang miskin;
3. *Distributive*, yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu; dan
4. *Constituent*, yaitu ditujukan untuk melindungi negara.<sup>38</sup>

Menurut Nugroho yang dikutip oleh Harbani Pasolong, kebijakan

publik itu dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Kebijakan yang bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum.

<sup>37</sup> Ilham Arief Sirajuddin, 2014, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar*, Jurnal Alumni Ilmu Administrasi Publik PPS-UNM: Vol. 4, No. 1, Makassar, h. 3.

<sup>38</sup> Harbani Pasolong, *Op. Cit.*, h. 39.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kebijakan yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota.
3. Kebijakan yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya, seperti kebijakan yang dikeluarkan aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Walikota.<sup>39</sup>

### Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Menurut Anderson yang dikutip oleh Harbani Pasolong, mengatakan bahwa jenis-jenis kebijakan ada beberapa, yaitu :

1. Kebijakan Substantif vs Kebijakan Prosedural. Kebijakan substantif adalah kebijakan yang menyangkut apa yang dilakukan pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif itu dapat dilaksanakan.
2. Kebijakan Distributif vs Kebijakan Regulatori vs Kebijakan Redistributif. Kebijakan distributif adalah menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelanggaran terhadap perilaku individu atau sekelompok orang. Kebijakan redistributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan pendapatan, pemilikan atau hak-hak dalam berbagai kelompok dalam masyarakat.

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 40.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kebijakan Material vs Kebijakan Simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan sumber daya kongkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*publik goods*) dan barang privat (*private goods*). Kebijakan *publik goods* adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan *private goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.<sup>40</sup>

#### d. Tujuan kebijakan publik

Menurut Riant Nugroho dalam bukunya yang dikutip oleh Hayat mengemukakan empat tujuan kebijakan publik, yaitu :

1. Mendistribusikan sumber daya secara nasional, yang mencakup redistribusi dan absorpsi sumber daya secara nasional;
2. Untuk regulasi (mengatur), liberasi (pembebasan), dan deregulasi (kegiatan atau proses menghapuskan pembatasan atau peraturan);
3. Dinamika dan stabilitas. Yaitu melakukan stabilitas terhadap situasi dan kondisi suatu negara; dan
4. Memperkuat pasar dan negara.<sup>41</sup>

### C. Teori Pelayanan Publik

#### Pengertian Pelayanan Publik

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 41.

<sup>41</sup> Hayat, *Kebijakan Publik, Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), h. 32.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, kelompok, dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pelayanan dapat juga diartikan dengan proses pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bentuk barang atau jasa melalui aktifitas orang lain secara langsung.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani, atau usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan. Sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang.<sup>42</sup>

Sedangkan menurut Lijan Poltak Sinambela, dkk istilah publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma yang merasa memiliki.<sup>43</sup>

Pelayanan publik menurut Ratminto dalam bukunya adalah segala kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap

<sup>42</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri>, diakses tanggal 5 Juli 2019, Pukul 22.39 WIB.

<sup>43</sup> Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 5.

<sup>44</sup> Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 18.

warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>45</sup>

Sementara itu fungsi pelayanan publik dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pasal 2 disebutkan bahwa pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam penerimaan pelayanan publik. Masyarakat mempunyai hak untuk menerima pelayanan secara baik dan berkualitas, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah tepat waktu, dan baik. Kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin kebutuhan masyarakat akan terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pelayanan publik.<sup>46</sup>

#### b. Jenis-Jenis Pelayanan Publik

Pelayanan publik dikelompokkan kedalam tiga jenis berdasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu :

1. Pelayanan Administratif, adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan yang berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, izin-izin, rekomendasi, keterangan, dan lain-lain.

<sup>45</sup> Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

<sup>46</sup> Hayat, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 51.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelayanan Barang, adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan/atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung (sebagai unit atau individual) dalam suatu sistem.
3. Pelayanan Jasa, adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya.<sup>47</sup>

Namun, menurut Kotler yang dikutip oleh Paimin Napitupulu

menyebutkan sejumlah karakteristik pelayanan yaitu sebagai berikut :

1. *Intangibility* (tidak berwujud), tidak dapat dilihat, diraba, dirasa, didengar, dicium sebelum ada transaksi. Pembeli tidak mengetahui dengan pasti atau dengan baik hasil pelayanan (*service outcome*) sebelum pelayanan dikonsumsi.
2. *Inseparability* (tidak dapat dipisahkan), dijual lalu diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan karena tidak dapat dipisahkan. Karena itu, konsumen ikut berpartisipasi menghasilkan jasa layanan. Dengan adanya kehadiran konsumen, pemberi pelayanan berhati-hati terhadap interaksi yang terjadi antara penyedia dan pembeli. Keduanya mempengaruhi hasil layanan.
3. *Variability* (berubah-ubah dan bervariasi). Jasa beragam, selalu mengalami perubahan, tidak selalu sama kualitasnya bergantung kepada siapa yang menyediakannya dan kapan serta dimana disediakan.

<sup>47</sup> Harbani Pasolong, *Op. Cit.*, h. 129.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. *Perishability* (cepat hilang, tidak tahan lama), jasa tidak dapat disimpan dan permintaannya berfluktuasi. Daya tahan suatu jasa layanan bergantung kepada situasi yang diciptakan oleh berbagai faktor.<sup>48</sup>

### Tujuan Pelayanan Publik

Dalam Hayat, menyebutkan bahwa tujuan pelayanan publik adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>49</sup>

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu, dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari :

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang dibutuhkan dan disediakan secara memadai dan mudah dimengerti;

<sup>48</sup> Paimin Napitupulu, *Pelayanan Publik & Customer Satisfaction*, (Bandung: PT. Alumni, 2016), h. 164.

<sup>49</sup> Hayat, *Op. Cit.*, h. 53.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dengan kemampuan pemberi dan penerima dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas;
4. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya SARA; dan
6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.<sup>50</sup>

#### d. Asas-Asas Pelayanan

Pelayanan umum dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Karena itu harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak;
2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan

<sup>50</sup> Lijan Poltak Sinambela, *Op. Cit.*, h. 6.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegangan pada efisiensi dan efektif;

3. Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
4. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>51</sup>

#### e. Pola-Pola Pelayanan Publik.

Pola atau model penyelenggaraan pelayanan umum adalah kesatuan bentuk tata penyelenggaraan pelayanan yang didasarkan pada suatu prosedur dan tata kerja atau rangkaian kegiatan tertentu yang dilaksanakan secara sistematis dengan memperhatikan sendi atau prinsip-prinsip pelayanan umum. Sesuai dengan Kemenpan Nomor 63 Tahun 2003 dapat dilaksanakan dengan pola pola pelayanan sebagai berikut :

#### 1. Pola Pelayanan Fungsional

Pada umumnya pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik selalu mencoba dalam memberikan pelayanan, mencari cara yang paling

<sup>51</sup> Atika Nur Amalia, *Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu*, Skripsi, h. 43.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efisien dan efektif yakni dengan membentuk berbagai cara yang sering disebut sebagai “pola”.

#### 2. Pola Terpusat

Pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggaraan pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan.

#### 3. Pola Terpadu

Pola pelayanan terpadu diselenggarakan dalam satu tempat atau pintu yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa tempat atau pintu.

#### 4. Pola Gugus Tugas

Petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan tertentu.<sup>52</sup>

#### f. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik.

Sesuai dengan Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang ditetapkan dengan Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003, maka prinsip-prinsip pelayanan publik dapat dipahami dengan penjelasan sebagai berikut :

##### 1. Kesederhanaan

Prinsip kesederhanaan ini hakikatnya lebih melaksanakan pada aspek prosedur kerja penyelenggaraan termasuk persyaratan maupun

<sup>52</sup> Bambang Istianto, *Managemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h. 110-111.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan teknis operasional yang tidak berbelit-belit, mudah dilaksanakan dan dipahami.

2. Kejelasan

Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal :

- a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik;
- b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan, persoalan, dan sengketa dalam pelayanan publik; dan
- c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

3. Kepastian Waktu

Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur tata cara pelayanan, persyaratan pelayanan baik persyaratan teknis maupun persyaratan administrasi, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayaran, jadwal waktu penyelesaian pelayanan.

4. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.

5. Keamanan

Dalam prinsip ini, memberikan petunjuk bahwa dalam proses pelaksanaan pemberian pelayanan agar diciptakan kondisi dan mutu dengan memperhatikan faktor keamanan, nyaman, dan memberikan kepastian hukum.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Tanggungjawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

## 7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan peralatan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).

## 8. Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

## 9. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

## 10. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.<sup>53</sup>

**D. Teori Administrasi Kependudukan**

## a. Pengertian Administrasi Kependudukan

<sup>53</sup> Ratminto, *Op. Cit.*, h. 22.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata administrasi bersal dari bahasa latin yaitu *administrate* yang berarti *to manage*. Administrasi berarti kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.<sup>54</sup> Dalam pengertian luas administrasi adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapan-tahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam implementasinya, administrasi mempunyai fungsi-fungsi diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan fungsi pengawasan. Dalam arti sempit, administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, dan sebagainya yang bersifat ketatausahaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan kependudukan adalah hal-hal yang berhubungan dengan struktur, jumlah, jenis kelamin, umur, perkawinan, kehamilan, kelahiran, kematian dan lain-lain hingga ketahanan yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dan yang dimaksud dengan penduduk adalah warga negara dan orang asing yang tinggal di negara tersebut.<sup>55</sup>

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi

<sup>54</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 28.

<sup>55</sup> <http://www.pengertianku.net>, *Pengertian Kependudukan*, diakses tanggal 10 Juli 2019, Pukul 22.21 WIB.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kependudukan serta pendaya gunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.<sup>56</sup>

#### Arah dan Maksud Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan diarahkan untuk :

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang professional;
2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

Sistem informasi administrasi kependudukan dimaskudkan untuk :

1. Terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional;
2. Terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. Terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang professional; dan
4. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat,

<sup>56</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016),



lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

## E. Kartu Identitas Anak

### a. Pengertian Kartu Identitas Anak

Program Kartu Identitas Anak merupakan program kependudukan terbaru yang dilaksanakan oleh pemerintah di 50 Kabupaten/Kota di Indonesia pada Tahun 2016. Program ini menjadi salah satu pelayanan kependudukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan melalui penertiban dokumen kependudukan sebagai bentuk pendaftaran dan pencatatan sipil.

Kartu Identitas Anak atau disingkat dengan KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.<sup>57</sup>

### b. Tujuan dan Manfaat Program Kartu Identitas Anak

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak menyatakan, bahwa tujuan pemerintah menerbitkan KIA yaitu, (1) untuk meningkatkan pendataan, (2) perlindungan dan pelayanan publik, dan (3) upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, khususnya bagi yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku

<sup>57</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK).

Sedangkan manfaat pelaksanaan program KIA adalah memberikan tanda pengenal atau bukti diri yang sah bagi anak berusia kurang dari 17 tahun. Selain itu, juga bisa digunakan untuk pendaftaran sekolah, dasar pembuatan KTP, membuka rekening di Bank, pembuatan passport, dan lain sebagainya.

#### Prosedur Pendaftaran Kartu Identitas Anak

Prosedur penerbitan KIA menurut Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak diuraikan sebagai berikut :

1. Batasan terakhir usia terhadap kepemilikan KIA adalah 17 tahun kurang satu hari, karena berkaitan dengan batas usia kepemilikan KTP
2. Pemberlakuan KIA ada dua macam yaitu untuk usia 0-5 tahun dicetak tanpa foto, dan untuk usia diatas 5 tahun sampai 17 tahun kurang satu hari dicetak menampilkan foto.

**Tabel 3.1**

#### **Persyaratan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)**

No	Anak WNI	No	Anak Orang Asing
1.	Kurang dari 5 tahun :	1.	Kurang dari 5 tahun :
	Mengisi formulir KIA,		Mengisi formulir KIA
	FC akta kelahiran & menunjukkan asli		FC passport & izin tinggal tetap
	KK asli orang tua /wali		KK asli orang tua / wali
	KTP-el orang tua / wali		KTP orang tua / wali
2.	Usia 5 th s/d 17 th (-) 1 hari :	2.	Usia 5 th s/d 17 th (-) 1 hari :
	Mengisi formulir KIA		Mengisi formulir KIA
	FC akta kelahiran & menunjukkan asli		FC passport & izin tinggal tetap
	KK asli orang tua /wali		KK asli orang tua / wali
	KTP-el orang tua / wali		KTP orang tua / wali
	Pas photo berwarna 3x4		Pas photo berwarna 3x4

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.	Masa berlaku :	3.	Masa berlaku :
	Kurang dari 5 tahun adalah sampai anak usia 5 tahun		Sesuai dengan izin tinggal tetap orang tua
	Lebih dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun (-) 1 hari		

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kebijakan program KIA berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi bisa dikatakan sudah cukup baik dengan memulai secara mandiri pada akhir tahun 2017. Namun terkait dengan peranan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dapat dikatakan masih kurang maksimal, kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dan juga belum adanya kerjasama yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dengan para *Stakeholder* untuk memaksimalkan program KIA ini. Hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya kepemilikan KIA dalam masyarakat yaitu hanya berkisar 23.94% dari 37.394 anak yang baru memiliki KIA ini.
2. Dalam pelaksanaan program KIA ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi memiliki beberapa kendala yaitu seperti : (1) kurangnya anggaran dana dari APBD maupun APBN, (2) kurangnya SDM yang dimiliki Disdukcapil Kota Bukittinggi, (3) kurangnya sarana dan prasarana pendukung program KIA, dan (4)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurangnya kesadaran masyarakat akan tertib administrasi kependudukan terutama dalam mengurus KIA.

### B. Saran

1. Dalam melaksanakan program KIA ini, hendaknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi lebih intensif dan lebih giat lagi melakukan sosialisasi langsung terjun ke lapangan, sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengetahui mengetahui secara jelas fungsi-fungsi dari KIA ini. Disdukcapil dan Pemerintah Kota Bukittinggi hendaknya segera melakukan kerjasama-kerjasama dengan berbagai pihak dan *stakeholders* yang ada sehingga program ini dapat berjalan maksimal dan dapat dirasakan manfaatnya.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dan berbagai pihak yang terkait hendaknya segera menambah SDM serta sarana dan prasarana untuk memaksimalkan program KIA ini agar berjalan dengan lancar. Untuk masyarakat harusnya mengubah pola pikir bahwa KIA itu tidak penting karena masih bisa menggunakan akta kelahiran dan Kartu Keluarga. Pola pikir seperti itu membuat peraturan ini terasa lemah pelaksanaannya di lapangan ditambah dengan tidak ada sanksi yang diberikan dalam peraturan ini. Hendaknya peraturan ini ditambah beberapa pasal mengenai sanksi yang diberikan kepada masyarakat jika tidak memiliki KIA.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Bambang Istianto, *Managemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Mitra Wacana Media : Jakarta, 2011

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2005

Deddy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung : Alfabeta, 2018

Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta, 2014

Hayat, *Kebijakan Publik, Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi*, Malang : Intrans Publishing, 2018

\_\_\_\_\_, *Manajemen Pelayanan Publik*, Jakarta : Rajawali Pers, 2017

Indra, dkk, *Panduan Penyusunan Skripsi*, Pekanbaru : Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA, 2014

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung : Nuasa, 2009

Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara, 1994

Rejan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Bumi Aksara : Jakarta, 2006

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan : Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta : Kanisius, 2007

Miftah Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2016

Paimin Napitupulu, *Pelayanan Publik & Customer Satisfaction*, Bandung : PT. Alumni, 2014

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2010

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013

Seifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2011

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2012

Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UII Press, 1982

\_\_\_\_\_, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015

#### Peraturan Perundang-undangan :

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak

#### Jurnal :

Atika Nur Amalia, Skripsi, 2016, *Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Di Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Julia Aziza, dkk, 2017, *Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di kota Semarang*, Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro : vol. 6, No. 2, Semarang

Handy Afrizal, dkk, 2017, *Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak Di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung

Dian Fitriani Afifah dan Neneng Yani Yuningsih, 2016, *Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak Di Kabupaten Cianjur*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Padjararan : Vol. 2, No. 2, Bandung

Cartiria Hutami dan Anis Chariri, *Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Inspektorat Kota Semarang)*, Jurnal Universitas Diponegoro

Ilham Arief Sirajuddin, 2014, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial Di Kota Makassar*, Jurnal Alumni Ilmu Administrasi Publik PPs UNM : Vol. 4, No. 1, Makassar

Muthiawanthi, 2017, *Tantangan "Role"/Peran yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora : Vol. 4, No. 2, Jakarta

### Internet :

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_negara\\_menurut\\_jumlah\\_penduduk](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk),

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/negara>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peranan>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri>

<http://rri.co.id/post/berita/377480/> daerah penerbitan kartu identitas anak di Bkittinggi tunggu pencairan dana apbd

<http://www.pengertianku.net>, Pengertian Kependudukan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون**

**FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soehrantas No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 13 Mei 2019

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/4196/2019  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada  
Yth. Muslim, S.Ag. SH., M.Hum  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum warhamatullahi wabarakatuh*

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : RINALDO OKTAVIANO  
NIM : 11527103142  
Jurusan : Ilmu Hukum SI

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

*[Signature]*  
Dr. Drs. Heri Sunandar, M.H.  
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052

Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/5188/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini  
menerangkan bahwa :

Nama : RINALDO OKTAVIANO  
N I M : 11527103142  
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

### UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 30 APRIL 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 27 Mei 2019



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون**

**FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 Km. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 Po. Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

Nomer : Un.04/F.I/PP.00.9/4197/2019  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 13 Mei 2019

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatulahi wabarokatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RINALDO OKTAVIANO  
NIM : 11527103142  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Dalam Penerbitan  
Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016  
Tentang Kartu Identitas Anak

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan  
  
Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 391119 Fax. (0761) 391117, PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126



032010

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NO/N IZIN-RISSET/22745  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4197/2019 Tanggal 13 Mei 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

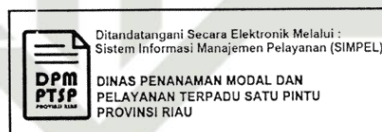
- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | RINALDO OKTAVIANO  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11527103142  |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM   |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | PERANAN DINAS KEPEDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BUKITTINGGI DALAM PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS KEPEDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BUKITTINGGI  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 14 Mei 2019



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
3. UIN Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342  
<http://dpmpstp.sumbarprov.go.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B.070 / 480 - PERIZ/DPM&PTSP/VI/2019

**Rekomendasi Penelitian**

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;  
 b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan : Sesuai Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/22745 tanggal 14 Mei 2019 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.
- Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- Nama : RINALDO OKTAVIANO  
 Tempat/Tanggal lahir : Bukittinggi / 01 Oktober 1996  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Jalan Prof Bahder Johan Nomor 36a RT 007/RW 002 Kelurahan Campago Ipuh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi  
 Nomor Kartu Identitas : 1375020110960001  
 Judul : Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak  
 Lokasi Penelitian : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi  
 Jadwal penelitian : 14 Mei 2019 - 14 November 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 17 Mei 2019

An. GUBERNUR SUMATERA BARAT  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



MASWAR DEDI, AP. MS  
 NIP. 19740618 199311 1001

dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan  
 Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRé

**Tembusan:**

1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Keshangpol Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Badan Keshangpol Kota Bukittinggi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/921/KKPol-KB/VI-2019

- Dasar** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

- Menimbang** :
- Bahwa Sesuai Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Nomor B.070/480-PERIZ/DPM&PTSP/V/2019 Tanggal 17 Mei 2019 Perihal Izin Penelitian.
  - Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
  - Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

**Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :**

Nama : **RINALDO OKTAVIANO**  
Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi, 01 Oktober 1996  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Jl.Prof Bahder Djohan Kel.Campago Ipuh Kec.Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi Prov.Sumatera Barat  
Nomor Identitas : 1375020110960001  
Judul Penelitian : Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak  
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi  
2. SMPN 4 Kota Bukittinggi  
3. SDN 14 ATIS Kota Bukittinggi  
4. Kecamatan se-Kota Bukittinggi  
Waktu Penelitian : 20 Juni 2019 s/d 20 September 2019  
Anggota Penelitian : -  
Digunakan Untuk : Izin Penelitian

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

- Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
- Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
- Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.
- Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 21 Juni 2019

a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BUKITTINGGI  
Kasi Bina Kesatuan Bangsa

*[Signature]*  
**DELISMAN, S.Sos**

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. H. Miskin Palolok Bukittinggi Telp.(0752) 35287 Fax (0752) 628287 Kode Pos 26121

**SURAT KETERANGAN**

No : 020 / Disdukcapil.1/ VI - 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dengan ini menerangkan :

Nama : RINALDO OKTAVIANO  
NIM : 11527103142  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat / Tgl.Lahir : Bukittinggi / 01 Oktober 1996  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  
Jurusan : Ilmu Hukum

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi. semenjak tanggal 29 Jan s/d 25 Jun 2019.

Dan pada saat surat ini dikeluarkan, yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 25 Juni 2019

a.n. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL,  
Sekretaris  
  
**TUTI HIDAYATI, SH**  
NIP. 19670303 198809 2 001

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul "PERANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA BUKITTINGGI DALAM PENERBITAN  
KARTU IDENTITAS ANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS  
ANAK", yang ditulis oleh :

Nama : **RINALDO OKTAVIANO**  
NIM : 11527103142  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Oktober 2019 M

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Drs. H. Heri Sunandar, M.CI**

Sekretaris  
**Roni Kurniawan, SH., MH**

Penguji I  
**Lovelly Dwina Dahan, SH., MH**

Penguji II  
**Hj. Nuraini Sahu, SH., MH**

Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Erni, S.Sos., MM**  
NIP. 19680226 199103 2 002

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### RIWAYAT HIDUP PENULIS



Rinaldo Oktaviano, lahir di Bukittinggi pada tanggal 01 Oktober 1996 merupakan anak kedua dari pasangan Yusrizal dan Irmailis. Penulis memulai pendidikan dari Sekolah Dasar Negeri 14 ATTS Kota Bukittinggi dan menyelesaikan pendidikan dasar tersebut pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan ke tingkat pertama yaitu pada SMP Negeri 4 Bukittinggi dan lulus pada tahun 2011. Setelah lulus dari sekolah tingkat pertama kemudian melanjutkan ke tingkat atas di SMA Negeri 2 Bukittinggi dan lulus pada tahun 2014. Setelah itu pada tahun 2015 penulis mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan lulus di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

Pada tahun 2018 penulis melakukan magang di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Bukittinggi. Pada tahun 2016 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KUKERTA) di Desa Rambah Baru, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian Penulis melakukan penelitian dan menyusun skripsi dengan judul : “Peranan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi dalam Penerbitan Kartu Identitas Anak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak”. Penulis mengikuti Sidang Munaqasyah yang dilaksanakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum pada hari Kamis, 12 September 2019 dan dinyatakan lulus dengan IPK 3.43.